

Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang

¹Donal Catria, ²Melinda Noer, ³Yossyafra
^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas
Korespondensi : donalcatria@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang yang terjadi sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran sehingga dapat merumuskan masukan perbaikan terhadap implementasi kebijakan penataan ruang pada kawasan perumahan dan permukiman di Kota Padang Panjang. Analisis data dilakukan dengan superimpose/ overlay peta pola ruang dengan peta sebaran bangunan yang ada di Kota Padang Panjang, didapatkan jumlah bangunan yang melanggar sebanyak 1732 unit bangunan (10,68 % dari total jumlah bangunan yang ada). Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat dan petugas pelaksana penyelenggaraan penatan ruang. Dari hasil pengolahan data , dari variabel yang diukur yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi didapatkan faktor birokrasi merupakan variabel paling signifikan berpengaruh terhadap pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang. Untuk selanjutnya dengan menggunakan analisi SWOT dirumuskan strategi untuk memperbaiki implementasi kebijakan penataan ruang sebagai berikut, meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penataan ruang Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan meningkatkan sosialisasi berbasis digital.

Kata kunci: Penataan ruang, tata ruang, perumahan dan permukiman

Abstract

The research aims to identify spatial planning violations that occur at the same time and find out the factors that cause violations so that they can formulate input for improvements to the implementation of spatial planning policies in residential areas and settlements in the City of Padang Panjang. Data analysis was carried out by superimposing or overlaying the spatial pattern map with the distribution map of existing buildings in the city of Padang Panjang, and the number of buildings violating was 1732 units (10.68% of the total number of existing buildings). Based on the results of questionnaires and interviews with the community and spatial planning implementation officers, From the results of data processing and the variables measured, namely communication, resources, disposition, and bureaucracy, it was found that the bureaucratic factor was the most significant variable influencing spatial planning violations in the City of Padang Panjang. Henceforth, by using the SWOT analysis, a strategy is formulated to improve the implementation of spatial planning policies as follows: improve the quality of spatial planning and policy for the City of Padang Panjang; increase the understanding and commitment of policymakers towards spatial planning; and increase digital-based outreach.

Keyword: spatial planning, housing, and settlements

1. PENDAHULUAN

Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan perkotaan merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan penataan ruang yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan Perencanaan kota dalam tahap pelaksanaan pembangunan merupakan arahan dan pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang bertujuan untuk menata pemanfaatan ruang serta meminimalisir permasalahan dan akibat negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan.

Penggunaan lahan adalah istilah kunci dalam bahasa perencanaan kota (Guttenberg 1959). Dalam kebijakan perencanaan kota, pengaturan penggunaan lahan dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Dalam pemanfaatan lahan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya diatur dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap peruntukan ruang dalam kebijakan perencanaan kota. Selain itu juga dirumuskan ketentuan intensitas ruang berupa ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ataupun terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB). Ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan sangat penting untuk dilaksanakan agar upaya pembangunan berkelanjutan dan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dapat terlaksana.

Berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, sangat diperlukan kebijakan penataan ruang yang dapat mengatasi permasalahan pemanfaatan ruang terutama untuk kawasan perumahan dan permukiman. Pengambil kebijakan penataan ruang dalam hal ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat melahirkan kebijakan sebagai pedoman bagi masyarakat maupun pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan lahan akan penyediaan kawasan untuk perumahan dan permukiman. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengeluarkan Rencana Tata Ruang (RTR) Kota Padang Panjang dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2030.

Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui perencanaan kawasan budidaya dan kawasan lindung telah dilakukan. Dengan luas wilayah 2900 Ha, Kota Padang Panjang merupakan wilayah perkotaan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Tahun 2020 (BPS-Statistics Indonesia 2020) yang memiliki lahan yang sangat terbatas. Jika dibandingkan luas kota dengan daerah Kabupaten/Kota lain, Kota Padang Panjang merupakan kota yang sangat kecil. Selain itu kondisi fisik permukaan tanah di Kota Padang Panjang relatif miring dari utara ke selatan dan sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan. **Kondisi lahan ini menjadikan Kota Padang Panjang memiliki keterbatasan lahan yang mendukung untuk dijadikan sebagai kawasan perumahan dan permukiman. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Padang Panjang,** luas kawasan budi daya lebih kurang 1.521,64 Ha (50,90%), selebihnya direncanakan sebagai kawasan lindung yang direncanakan dengan luas lebih kurang 1.459,9 Ha (49,10%).

Berdasarkan latar belakang dan merujuk pada Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2030, maka seharusnya Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui perencanaan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam perencanaan kota telah dapat dilaksanakan. Penetapan kawasan perumahan dan permukiman serta penerapan peraturan zonasi merupakan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah Kota Padang Panjang yang bertujuan untuk penataan pada kawasan perumahan dan permukiman telah dapat menjadi pedoman bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Namun masih saja terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian sejauh mana pelanggaran penataan ruang yang telah terjadi di Kota Padang Panjang terhadap Kebijakan Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, sehingga nantinya dapat dirumuskan masukan perbaikan terhadap implementasi kebijakan penataan ruang pada kawasan perumahan dan permukiman di Kota Padang Panjang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu; 1 mengidentifikasi sejauh mana ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui pemetaan pelanggaran kawasan perumahan dan permukiman berdasarkan

Peta Rencana Pola Ruang Kota Padang Panjang, 2 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kawasan perumahan dan permukiman, 3 merumuskan strategi untuk perbaikan implementasi penataan ruang kawasan perumahan dan permukiman di Kota Padang Panjang.

2. METODE

Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber individu ataupun kelompok responden terpilih. Dalam pelaksanaan dilapangan, data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Penyebaran kuesioner disini merupakan metode pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan kepada responden.

Adapun kebutuhan data dan sumber data primer dapat di lihat di tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 1. Kebutuhan data primer

No.	Sasaran	Indikator	Data Variabel	Bentuk	Jenis dan Sumber Data
1	Identifikasi faktor-faktor ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Kepemilikan dan ketersediaan lahan	- Data kuisisioner - Data wawancara	Tabel	Data primer, kuisisioner dan wawancara

Sumber : Hasil analisis

Sekunder

Data sekunder didapatkan dari dokumen yang sudah tersedia untuk menunjang dan melengkapi penelitian. Dokumen dalam penelitian ini terdiri dokumen resmi dengan kategori dokumen eksternal. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga, seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya (Bungin 2017). Data sekunder ini biasanya diperoleh dengan menyalin atau mengutip data yang sudah jadi. Data-data digunakan untuk analisis awal dari kegiatan penelitian merupakan data pendukung suatu objek atau tempat penelitian terhadap kriteria, cara, gambaran atau penyelesaian dalam suatu penelitian. Data dapat diperoleh dari instansi pemerintah yang ada di Kota Padang Panjang. Adapun kebutuhan data dan sumber data dapat di lihat di tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 2. Kebutuhan data sekunder

No.	Sasaran	Indikator	Data Variabel	Bentuk	Jenis dan Sumber Data
1	Identifikasi pelanggan pemanfaatan	1. Profil Wilayah dan Penduduk 2. Kebijakan Penataan Ruang	- Data Administrasi - Data sebaran bangunan - RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032	Tabel dan Peta	Data sekunder, sumber data DPUPR

n ruang	3. Data spasial	- Peta Pola Ruang RTRW
	ketidaksesuaian	Kota Padang Panjang
	pemanfaatan	- Data Bangunan di Kota
	ruang	Padang Panjang

Sumber : Hasil analisis

Tindak lanjut penelitian adalah dengan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang telah terkumpul, data akan dianalisis dengan cara *superimpose* atau *overlay* untuk mengidentifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang melalui pemetaan pelanggaran kawasan perumahan dan permukiman berdasarkan peta Rencana Pola Ruang Kota Padang Panjang dengan melakukan pengolahan data spasial dari data sekunder yang diolah dengan melakukan analisa spasial menggunakan model pemetaan GIS (*Geographic Information System*).

Pengolahan data peta digital dengan menggunakan data GIS, format data SHP (*shapefile*) yaitu data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data SHP disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur GIS digunakan untuk memindahkan beberapa data analisis seperti data geografis, data atribut profil wilayah, atribut dan data lain kedalam peta spasial menggunakan software GIS yaitu ArcMap. 10.8.

Pembuatan peta mengacu pada hasil *superimpose* atau *overlay* data Rencana Pola Ruang Kota Padang Panjang dengan data bangunan hasil interpretasi citra satelit tahun 2018 yang telah di setujui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai rujukan penyusunan peta dasar Kota Padang Panjang. Sehingga dari hasil pemetaan akan dihasilkan data tematik bangunan yang melanggar peruntukan pemanfaatan ruang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

Hasil pengisian kuesioner yang telah didapatkan melalui penyebaran kuesiner terhadap pemilik bangunan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pentaan ruang selanjutnya dilakukan analisis data variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan variabel yang telah ditentukan sebelumnya pada metode penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, birokrasi dan implementasi kebijakan tata ruang yang telah diambil dari 85 responden. Dari hasil pengisian kuesioner dilakukan pengolahan data melalui aplikasi SPSS untuk dengan hasil sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui normal tidaknya suatu data yang didapatkan. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov menggunakan pendekatan metode EXACT, selain metode pendekatan asymptotic yang biasa digunakan secara default dalam SPSS untuk uji normalitas Kolmogorov Smirnov, terdapat dua pendekatan lainnya yakni Monte Carlo dan EXACT. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode EXACT. Kelemahan dari metode asymptotic ialah akan memberikan hasil yang gagal jika data kecil, tidak seimbang, tidak terdistribusi dengan baik sedangkan metode EXACT dapat nilai yang akurat untuk data yang tidak berdistribusi dengan baik, ukuran data kecil, jarang, serta tidak seimbang ((Mehta dan Patel 2012). Sehingga pada penelitian ini akan menggunakan metode EXACT. Jika data yang diterima berdistribusi normal ($\text{Sig} > \alpha$) maka digunakan statistik parametris. Sedangkan jika data yang tidak normal ($\text{Sig} < \alpha$) maka akan digunakan statistik non parametris. Penelitian ini menggunakan nilai alpha (α) 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%

Tabel 3. Tabel uji normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94254933
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.134
	Negative	-.072
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.086
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan hasil analisis seperti pada tabel 12 dan nilai Exact Sig $0,085 > 0,05$ maka data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (Ghozali 2005). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF)

1. Jika nilai $VIF < 10$ atau nilai Tolerance $> 0,01$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai Tolerance $< 0,01$, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

Hasil pengujian multikolenieritas penelitian (pada lampiran 4) seperti tabel berikut :

Tabel 4. Nilai VIF uji Multikolenieritas

		Coefficients ^a		t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.211	.864	8.348	.000		
	Komunikasi	.035	.062	.082	.558	.578	2.847
	Sumber Daya	.110	.112	.182	.985	.328	4.530
	Disposisi	.048	.099	.081	.485	.629	3.710
	Birokrasi	.194	.097	.336	2.000	.049	3.750

a. Dependent Variable: Implementasi

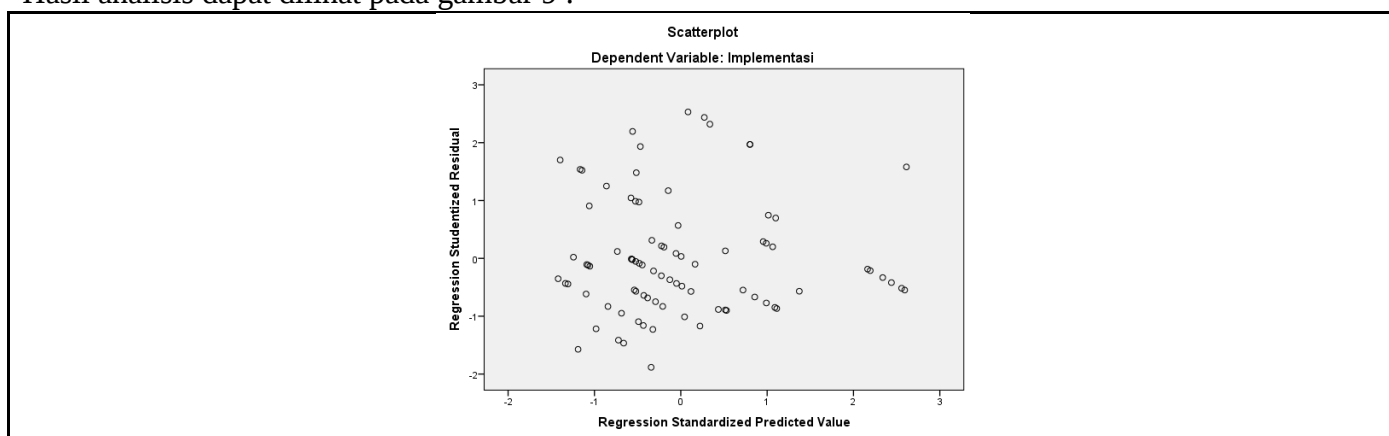
Dari tabel 13 diatas dapat dilihat hasil perhitungan nilai tolerance dari tiap variabel independen tidak ada yang menunjukkan $< 0,10$ dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hasil tiap variabel independen tidak ada yang > 10 . Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada antar variabel independen dalam model regresi ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk mengetahui gejala heteroskedstisitas adalah dengan melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi variable terikat (dependen). Dasar analisis dipakai sebagai berikut :

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, meleber kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil analisis dapat dilihat pada gambar 9 :



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (F)

Uji Simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen. Jika hasil signifikan berarti ada hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5 %. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari nilai F tabel, yang menyatakan variabel independen berpengaruh terhadap variable dependen dapat diterima. Hasil output analisis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	210.603	4	52.651	13.288	.000 ^b
	Residual	316.974	80	3.962		
	Total	527.576	84			

a. Dependent Variable: Implementasi

b. Predictors: (Constant), Birokrasi, Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya

Dari tabel 14 diatas didapatkan nilai F hitung sebesar 13,288. Setelah didapatkan F hitung, maka ditentukan F tabelnya, yaitu dengan cara :

1. Menentukan signifikan , yaitu tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5 % atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)

2. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 %, $\alpha = 5$ %, df 1 (jumlah variable (5-1)= 4, dan df2 (n-k-1) atau 85-4-1 = 80 (n adalah jumlah kasus k adalah jumlah variable independen), hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 2,33

Jika dibandingkan F tabel dengan F hitung, maka F hitung (13,288) > F tabel (2,33). Karena F hitung > F tabel, artinya ada pengaruh secara signifikan K, S, D dan B secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan (IM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Birokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Implentasi Kebijakan.

2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil uji t

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	7.211	.864			8.348	.000	
	Komunikasi	.035	.062	.082	.558	.578	.57	.351
	Sumber Daya	.110	.112	.182	.985	.328	.32	.221
	Disposisi	.048	.099	.081	.485	.629	.62	.270
	Birokrasi	.194	.097	.336	2.000	.049	.04	.267

a. Dependent Variable: Implementasi

Dari tabel diatas didapatkan nilai t hitung untuk masing-masing variabel, yaitu : komunikasi (K) 0,558 dengan nilai sig 0,578, Sumber Daya (S) 0,985, dengan nilai sig 0,328, Disposisi (D) 0,485, dengan nilai sig 0,629, Struktur Birokrasi (SB) 2,00 dengan nilai sig 0,049.

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5$ % Tabel distribusi t dicari pada %5 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k atau 85 - 4 = 81 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,664

1. Pengujian koefisien regresi variabel Komunikasi (K)

Nilai t hitung pada variabel komunikasi adalah 0,558 Jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, pada variabel komunikasi didapatkan t hitung < t tabel yaitu 0,558 < 1,664 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2. Pengujian koefisien regresi variabel Sumber Daya (S)

Nilai t hitung pada variabel sumber daya adalah 0,985 Jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, pada variabel komunikasi didapatkan t hitung < t tabel yaitu 0,985 < 1,664 Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

(2) Pengujian koefisien regresi variabel Disposisi (D)

Nilai t hitung pada variabel disposisi adalah 0,485. Jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, pada variabel disposisi didapatkan t hitung $< t$ tabel yaitu $0,485 < 1,664$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

(3) Pengujian koefisien regresi variabel Birokrasi (B)

Nilai t hitung pada variabel birokrasi adalah 2,00, jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, pada variabel birokrasi didapatkan t hitung $> t$ tabel yaitu $2,00 > 1,664$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Birokrasi secara partial berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan pengolahan data kuesioner di atas maka dapat diketahui bahwasanya variabel Birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan sesuai dengan uji t yang telah dilakukan dimana nilai t hitung pada variabel birokrasi adalah 2,090, jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, pada variabel birokrasi didapatkan t hitung $> t$ tabel yaitu $2,090 > 1,664$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Birokrasi secara partial berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Perumusan strategi perbaikan implementasi penataan ruang

Analisis SWOT yaitu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang berkaitan dengan visi, misi, rencana strategis, dan keputusan organisasi (Rangkuti, 2003: 18). Untuk mengetahui sejauh mana upaya penyelenggaraan penataan ruang di Kota Padang Panjang, perlu diketahui SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) terhadap kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan, sehingga dapat dirumuskan strategi peningkatan upaya penyelenggaraan penataan ruang kedepan agar lebih terlaksana dan dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Tabel 7. Matrik SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	Kekuatan (S) 1. Tersedia pedoman/Regulasi Penataan ruang telah ditetapkan 2. Tim pengendalian dan pengawasan melibatkan OPD lain 3. Telah mulai melakukan pelayanan melalui data digital 4. Data pendukung spasial yang lengkap dengan luas wilayah yang kecil	Kelemahan (W) 1. Komitmen pimpinan terhadap perwujudan rencana tata ruang 2. Anggaran yang masih kurang untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang 3. Kuantitas dan kualitas SDM belum mencukupi 4. Belum maksimal penyebaran informasi tata ruang
	Potensi (O) 1. Dapat melakukan Revisi Rencana Tata Ruang 2. Penggunaan lahan dengan bangunan vertikal 3. Merubah paradigma perilaku penataan ruang	Strategi SO 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan peraturan dengan melakukan revisi Rencana Tata Ruang dengan memanfaatkan data dukung spasial yang lengkap
		Strategi WO 1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang 2. Meningkatkan anggaran penyelenggaraan tata ruang

	2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan melalui pemanfaatan data digital 3. Peningkatan pemahaman tata ruang melalui pendidikan masyarakat 4. Perencanaan penggunaan lahan dengan bangun vertikal	dan pelatihan terhadap terhadap SDM pelaksana 3. Meningkatkan sosialisasi berbasis digital.
Ancaman (T) 1. Luas administrasi perencanaan yang berkurang berdasarkan kesepatan dengan daerah tetangga 2. Keterbatasan lahan untuk perumahan dan permukiman 3. Harga lahan yang mahal di Kota Padang Panjang 4. Kebijakan lahan Sawah dilindungi (LSD)	Strategi ST 1. Adanya kepastian batas Admisitrasi dalam perencanaan RTRW 2. Adanya usaha memaksimalkan penyediaan kasawan perumahan dan permukiman pada lahan yang terbatas	Strategi WT 1. Adanya penyediaan lahan-lahan pemerintah untuk penyediaan bangunan sewa bagi masyarakat kota Padang Panjang 2. Menignkatkan sosialisasi terkait lasan sawah dilindungi melalui sosialisasi untuk mengurangi pelanggaran LSD

5. Strategi

Dari hasil Metrik SWOT di atas dapat di kembangan menjadi strategi untuk perwujudan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan tata ruang di Kota Padang Panjang, dapat di lihat tabel berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penataan ruang Kota Padang Panjang
 Dengan adanya kesempatan untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang dengan memanfaatkan data dukung spasial yang lengkap, diharapkan terwujud kebijakan penataan ruang untuk penyediaan lahan perumahan dan permukiman pada lahan yang terbatas dengan lebih maksimal. Dalam rencana program dan kegiatan dilaksanakan dengan melaksanakan kebijakan bangunan vertikal serta penyediaan lahan-lahan oleh pemerintah untuk penyediaan bangunan sewa bagi masyarakat Kota Padang Panjang
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang
 Kebijakan-kebijakan penatan ruang yang diambil oleh pemerintah Kota Padang Panjang harus didukung oleh peningkatan pemahaman tata ruang melalui merubah paradigma perilaku penataan ruang baik oleh pimpinan daerah dan petugas pelaksana maupun masyarakat Kota Padang Panjang. Untuk itu perlu didukung dengan pemenuhan SDM terkait penataan ruang serta peningkatan anggaran penyelenggaraan tata ruang di Kota Padang Panjang.
3. Meningkatkan sosialisasi berbasis digital
 Sosialisasi kebijakan penataan ruang perlu terus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kebijakan- kebijakan yang telah dituangkan dalam peraturan daerah.

4. KESIMPULAN

Dalam kebijakan perencanaan kota, pengaturan penggunaan lahan dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Peningkatan jumlah penduduk jika tidak didukung dengan penyediaan

lahan perumahan dan permukiman yang direncanakan, akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran penataan dan alih fungsi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kebijakan penataan ruang. Semenjak ditetapkan kebijakan penataan ruang masih saja terjadi pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang. Berdasarkan analisis *superimpose/ overlay* peta pola ruang dengan sebaran bangunan yang ada di Kota Padang Panjang. Didapatkan jumlah bangunan yang melanggar pada kawasan lindung sebanyak 1732 unit bangunan (10,68 % dari total jumlah bangunan yang ada).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat dan petugas pelaksana penyelenggaran penatan ruang. Dari 4 variabel yang diukur yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi didapatkan adanya faktor birokrasi paling signifikan berpengaruh terhadap pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang. Hal ini didukung karena masih lemahnya komitmen Pimpinan Daerah terhadap perwujudan rencana tata ruang, ketidakpastian anggaran, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi dan belum maksimalnya penyebaran informasi tata ruang yang dilakukan.

Dari faktor-faktor penyebab pelanggaran pemanfaatan ruang di atas berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kota Padang Panjang, maka rumusan strategi untuk memperbaiki implementasi kebijakan penataan ruang sebagai berikut, meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penataan ruang Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan meningkatkan sosialisasi berbasis digital.

5.SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan saran terhadap permasalahan yang ada, yaitu :

1. Diharapkan Perguruan Tinggi dapat mendukung program penyelenggaraan penataan ruang sebagai mitra pemerintah daerah dalam tahanan perencanaan penatan ruang agar terwujud implentasi kebijakan penataan ruang khususnya penyediaan kawasan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan arah pengembangan kota.
2. Diharapkan pembuat kebijakan/ pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan peraturan, melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakan aturan penataan ruang serta melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Padang Panjang
3. Bagi masyarakat Kota Padang Panjang untuk dapat mempedomani perencanaan dalam pemanfaatan ruang kota sesuai dengan kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang untuk keberlanjutan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, Mohd Ibnu, and Warijo. 2015. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat)." *Jurnal Administrasi Publik* 6 (2): 92–113.
- [2] Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- [3] Ardhasri, Johanita, Zainal Hidayat, and Dewi Rostyaningsih. 2011. "Implementasi Perda No 14

- Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Semarang (Studi Kasus Pembatasan Lahan Untuk Perumahan Di Atas Perbukitan),” no. 14.
- [4] Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] BPS-Statistics Indonesia. 2020. “Perka BPS Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2020.” https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Perka_BPS_Nomor_120_Tahun_2020_Tentang_Klasifikasi_Desa_Perkotaan_dan_Perdesaan_di_Indonesia_Tahun_2020_1659511791.pdf.
- [6] Branch, Melville C, Akhmad Junaedi, and Bambang Hari Wibisono. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar & Penjelasan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [7] Budihardjo, Eko, and Sudanti Hardjohuboj. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Ed.1. Bandung: Bandung : Alumni.
- [8] Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Depok: Prenadamedia Group.
- [9] ———. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers.
- [10] Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed No Title*. Yogyakarta: Yayasan Mitra Netra Pustaka Pelajar.
- [11] Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. 4th ed. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall.
- [12] Farida, Rida, and Muhammad Ali Ramdhani. 2014. “Conceptual Model of the Effect of Environmental Management Policy Implementation on Water Pollution Control to Improve Environmental Quality.” *International Journal of Scientific and Technology Research* 3 (10): 169–99.
- [13] Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi MultiVariate Dengan Program SPSS*. Edited by Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- [14] Guttenberg, A.Z. 1959. “A Multiple Land Use Classification System.” *Journal of The American Planning Association* 25: 143–50. <https://doi.org/10.1080/01944365908978322>.
- [15] Hadi, Sutrisno. 1991. *Analisis Butir Untuk Instrumen Angket, Tes Dan Skala Nilai Dengan Basica*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [16] Hirawan, Zaenal, Entang Adhy Muhtar, Asep Sumaryana, and Josy Adiwisastra. 2018. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Subang.” *Jurnal Administrasi Publik* 9 (2): 193–207. <https://doi.org/10.31506/jap.v9i2.4762>.
- [17] Irfan Islamy, M. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [18] Korten, Syahri, and David C. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [19] Kurniati, Poni Sukaesih. 2016. “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung.” *Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI (2): 101–12.
- [20] Mehta dan Patel. 2012. *IBM SPSS Exact Tests*. Edited by IBM Corporation. <http://www.spss.co.jp/medical/tutorial/04.html> ???
- [21] Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional. 2021. “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang.”
- [22] Mustafa, Teuku, Eddy Purnama, and Mahdi Syahbandir. 2016. “KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie).” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4 (2): 1–7.
- [23] Novliza Eka Patrisia, Eva Oktianti. 2020. “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Wilayah Tahun 2012-2032 Di Kota Bengkulu.” *Administrasita* ’ 6 (1).
- [24] Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. 2013. “Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.” Kota Padang Panjang.
- [25] Pemerintah Republik Indonesia. 2007. “Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.”
- [26]———. 2011. “Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.” Jakarta.
- [27]———. 2021. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang.”
- [28] Pradana, Gatu Adie. 2016. “Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan Di Puskesmas Kepanjen).” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2 (3): 79–87. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.11>.
- [29] Yossyafra, Melinda Noer, Rini Hakimi, and Muhamad Reza. 2018. “A Challenge in Providing Housing Land and Sustainable Agricultural Land; An Effort to Meet the Backlog of Housing and Food Security in West Sumatra.” *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 8 (6): 2696–2701. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.6.7262>.